SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.1735

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN ANGGARAN TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KOTA SEMARANG

Analysis of the Effectiveness and Efficiency of Budget Management in Relation to the Implementation of the Family Hope Program (PKH) in Semarang City

Ratu Mutiara Azzah[1*]

Eva Hany Fanida[2]

Melda Fadiyah Hidayat[3]

*[123]Universitas Negeri Surabaya

*email:
25040674390@mhs.unesa.ac.id

Lisensi:CC-BY

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Semarang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif analitis, menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Sosial, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum efektivitas PKH di Kota Semarang tergolong cukup baik. Hal ini terlihat dari kontribusinya dalam menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam ketepatan sasaran akibat belum optimalnya pemutakhiran data penerima manfaat. Dari sisi efisiensi, pengelolaan anggaran PKH menunjukkan adanya upaya optimalisasi melalui sistem bantuan berbasis kategori dan penyaluran non-tunai. Meskipun demikian, efisiensi program masih menghadapi tantangan berupa fluktuasi anggaran yang tidak selalu sebanding dengan output yang dihasilkan serta keterlambatan dalam penyaluran bantuan. Secara keseluruhan, efektivitas dan efisiensi PKH di Kota Semarang belum sepenuhnya berjalan secara seimbang. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem pendataan, penguatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan kualitas pengawasan agar program dapat memberikan dampak yang lebih optimal dan berkelanjutan dalam penanggulangan kemiskinan.

Kata Kunci:
Program Keluarga Harapan (PKH),
Efektivitas,
Efisiensi,
Keuangan Publik,
Kemiskinan

Keywords:
Family Hope Program (PKH),
Effectiveness,
Efficiency,
Public Finance,
Poverty

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness and efficiency of budget management for the Family Hope Program (PKH) in Semarang City and to identify the factors influencing its implementation. The method used is a qualitative approach with descriptive-analytical techniques, utilizing secondary data from the Central Statistics Agency, the Ministry of Social Affairs, and various relevant scientific literature. The results of the study indicate that, in general, the effectiveness of the PKH in Semarang City is quite good. This is evident from its contribution to reducing poverty rates, improving access to education and healthcare, and alleviating the financial burden on poor households. However, there are still challenges regarding the accuracy of targeting due to suboptimal updates to beneficiary data. In terms of efficiency, the management of the PKH budget demonstrates efforts toward optimization through a category-based assistance system and non-cash disbursements. Nevertheless, the program's efficiency still faces challenges in the form of budget fluctuations that do not always correspond to the output generated, as well as delays in the disbursement of assistance. Overall, the effectiveness and efficiency of the PKH in Semarang City have not yet been fully balanced. Therefore, improvements are needed in the data collection system, strengthening of inter-agency coordination, and enhancing the quality of oversight so that the program can deliver more optimal and sustainable impacts in poverty alleviation.

Submit Tgl.: 24-April-2026	Diterima Tgl.: 25-April-2026	Diterbitkan Tgl.: 27-April-2026

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi masalah krusial dalam pembangunan nasional Indonesia yang memerlukan penanganan secara sistematis dan berkelanjutan. Dalam sudut pandang administrasi publik dan keuangan negara, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan tingkat penghasilan masyarakat yang rendah, tetapi juga menggambarkan batasan akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Maka dari itu, upaya pemerintah melalui kebijakan fiskal, terutama dalam bentuk program bantuan sosial, menjadi instrumen penting dalam upaya mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Salah satu program unggulan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang merupakan bentuk bantuan sosial bersyarat. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan pendekatan jangka panjang yang berfokus pada aspek pendidikan dan kesehatan bagi keluarga penerima manfaat (KPM). PKH tidak hanya memberikan dukungan finansial tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui kewajiban tertentu, seperti kehadiran anak di sekolah dan pemanfaatan layanan kesehatan (Nova, Priyadi, & Purnaweni, 2023)

Secara umum, pelaksanaan PKH di tingkat nasional menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, baik dari jumlah penerima manfaat maupun pengalokasian anggaran. Hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah untuk menjadikan PKH sebagai instrumen utama dalam pengentasan kemiskinan. Namun demikian, peningkatan alokasi anggaran juga memerlukan adanya akuntabilitas dan pengelolaan yang efisien agar dana publik yang digunakan dapat berdampak signifikan bagi masyarakat.

Dalam konteks daerah, Kota Semarang, sebagai salah satu kota besar di Provinsi Jawa Tengah, memiliki karakteristik kemiskinan yang cukup rumit. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kota Semarang pada tahun 2023 berada pada kisaran 4,23%, yang yang menandakan adanya penurunan setelah lonjakan saat pandemi COVID-19. Meskipun angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi, isu kemiskinan masih menjadi tantangan dalam pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa program seperti PKH masif dibutuhkan untuk menjaga stabilitas kesejahteraan masyarakat.

Dari sudut pandang keuangan publik, keberhasilan suatu program tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga dari seberapa efektif dan efisien penggunaannya. Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana tujuan program tercapai, sementara efisiensi berhubungan dengan kemampuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Dalam praktiknya, implementasi PKH masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketidaktepatan sasaran, penyaluran bantuan yang terlambat, serta potensi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial.

Beberapa penelitian mengindikasikan bahwa PKH memberikan kontribusi positif terhadap peningkat an akses pendidikan dan kesehatan, serta membantu meningkatkan konsumsi pada rumah tangga masyarakat miskin. Namun demikian, efektivitas dan efisiensi program ini masih perlu dikaji lebih dalam, terutama dalam konteks implementasi di tingkat daerah. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa PKH tidak sekadar berfungsi secara administratif, tetapi juga dapat memberikan dampak yang berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini difokuskan pada beberapa pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana efektivitas pengelolaan anggaran dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Semarang; (2) bagaimana efisiensi pemanfaatan anggaran dalam pelaksanaan program tersebut; serta (3) faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas serta efisiensi pengelolaan anggaran Program Keluarga Harapan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian keuangan publik serta menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan program.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Keuangan Publik dalam Penanggulangan Kemiskinan

Keuangan publik merupakan instrumen utama pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pembangunan, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut teori yang dikemukakan oleh Musgrave, keuangan publik memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, fungsi distribusi menjadi sangat dominan, di mana pemerintah berperan dalam mendistribusikan kembali pendapatan melalui kebijakan fiskal, salah satunya melalui program bantuan sosial (Murniawaty, 2021).

Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bentuk nyata dari implementasi fungsi distribusi tersebut. Melalui alokasi anggaran negara, pemerintah berupaya mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat miskin. Dengan demikian, pengelolaan anggaran dalam program ini harus dilakukan secara optimal agar dapat memberikan dampak yang maksimal terhadap penurunan kemiskinan.

Konsep Efektivitas dalam Kebijakan Publik

Efektivitas merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu program publik. Menurut Mahmudi (2015), efektivitas menunjukkan sejauh mana suatu program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan, maka semakin efektif program tersebut.

Dalam konteks kebijakan publik, efektivitas tidak hanya diukur dari output yang dihasilkan, tetapi juga outcome yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas program bantuan sosial seperti PKH dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain:

a. Ketepatan sasaran penerima manfaat
b. Pencapaian tujuan program
c. Dampak terhadap kesejahteraan masyarakat

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani dan Novarianti (2024) menunjukkan bahwa efektivitas PKH dapat dilihat dari kemampuannya dalam meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan serta mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin. Namun demikian, efektivitas program seringkali dipengaruhi oleh kualitas data penerima manfaat dan mekanisme implementasi di lapangan.

konsep Efisiensi dalam Pengelolaan Anggaran Publik

Efisiensi merupakan konsep yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan output yang maksimal. Dalam konteks keuangan publik, efisiensi mengacu pada kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran dengan biaya yang seminimal mungkin untuk mencapai hasil yang maksimal (Murniawaty, 2021).

Efisiensi dalam program bantuan sosial dapat diukur melalui:

a. Perbandingan antara anggaran yang digunakan dengan jumlah penerima manfaat
b. Ketepatan waktu penyaluran bantuan
c. Minimnya kebocoran atau penyimpangan anggaran

Dalam implementasi PKH, efisiensi menjadi isu penting karena program ini melibatkan anggaran yang cukup besar. Ketidaktepatan sasaran atau keterlambatan penyaluran bantuan dapat menyebabkan inefisiensi yang berdampak pada menurunnya kinerja program. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan anggaran yang optimal.

Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program ini memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dengan syarat tertentu, seperti kehadiran anak di sekolah dan pemanfaatan layanan kesehatan secara rutin (Nova, Priyadi, & Purnaweni, 2023).

PKH memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

a. Meningkatkan kualitas pendidikan anak dari keluarga miskin
b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
c. Mengurangi beban pengeluaran rumah tangga
d. Memutus rantai kemiskinan antar generasi

Dalam pelaksanaannya, PKH melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pendamping sosial. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada koordinasi antar lembaga serta akurasi data penerima manfaat.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa PKH memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Khasanah (2023) menemukan bahwa PKH berkontribusi terhadap peningkatan pengeluaran rumah tangga, khususnya pada sektor pendidikan dan kebutuhan dasar. Hal ini menunjukkan bahwa program ini mampu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup yang lebih layak.

Namun demikian, penelitian lain menunjukkan bahwa implementasi PKH masih menghadapi berbagai kendala. Murniawaty (2021) mengungkapkan bahwa ketidaktepatan sasaran dan potensi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program. Selain itu, keterlambatan penyaluran bantuan juga dapat memengaruhi efektivitas dan efisiensi program.

Penelitian oleh Nova, Priyadi, dan Purnaweni (2023) yang dilakukan di Kota Semarang menunjukkan bahwa meskipun PKH telah berjalan dengan cukup baik, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal validasi data penerima dan mekanisme distribusi bantuan.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi Program Keluarga Harapan. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan program, sedangkan efisiensi berkaitan dengan optimalisasi penggunaan sumber daya.

Dalam penelitian ini, efektivitas diukur melalui indikator ketepatan sasaran, pencapaian tujuan, dan dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, efisiensi diukur melalui perbandingan antara anggaran yang digunakan dengan output yang dihasilkan serta ketepatan dalam penyaluran bantuan.

Dengan demikian, analisis terhadap kedua aspek tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja pengelolaan anggaran PKH di Kota Semarang

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi Program Keluarga Harapan, khususnya dalam aspek efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran. Metode deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan kondisi empiris sekaligus menganalisis data berdasarkan konsep teoritis yang relevan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti laporan Badan Pusat Statistik, dokumen Kementerian Sosial, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Selain itu, data juga diperoleh dari jurnal ilmiah, buku referensi, dan publikasi resmi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan dokumentasi. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan keuangan publik, efektivitas, dan efisiensi, sedangkan studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data empiris dari sumber resmi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu dengan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan untuk kemudian dianalisis berdasarkan indikator yang telah ditentukan.

Indikator efektivitas dalam penelitian ini meliputi ketepatan sasaran, pencapaian tujuan program, serta dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, indikator efisiensi meliputi perbandingan antara input dan output serta optimalisasi penggunaan anggaran. Dengan menggunakan indikator tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran PKH di Kota Semarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pengelolaan Anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Semarang

Efektivitas pengelolaan anggaran dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Semarang merupakan aspek penting dalam menilai sejauh mana program ini mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui intervensi di bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam konteks keuangan publik, efektivitas tidak hanya dilihat dari besarnya anggaran yang disalurkan, tetapi lebih pada sejauh mana anggaran tersebut mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, analisis efektivitas PKH perlu dikaitkan dengan indikator empiris seperti tingkat kemiskinan, jumlah penerima manfaat, serta perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan di Kota Semarang menunjukkan tren yang relatif menurun dalam beberapa tahun terakhir setelah mengalami peningkatan pada masa pandemi COVID-19. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa kebijakan perlindungan sosial, termasuk PKH, memiliki kontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Tabel 1. Tingkat Kemiskinan Kota Semarang (2019–2023)

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase (%)
2019	84,41	4,14
2020	85,72	4,56
2021	83,68	4,56
2022	80,12	4,34
2023	78,10	4,23

Data tersebut menunjukkan bahwa setelah lonjakan kemiskinan pada tahun 2020 akibat pandemi, angka kemiskinan di Kota Semarang secara bertahap mengalami penurunan hingga tahun 2023. Penurunan ini tidak

dapat dilepaskan dari berbagai program bantuan sosial yang dijalankan pemerintah, termasuk PKH, yang berfungsi sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin. Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa penurunan tingkat kemiskinan merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor, seperti pemulihan ekonomi, kebijakan fiskal, serta program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, kontribusi PKH perlu dianalisis secara lebih spesifik melalui indikator lainnya.

Efektivitas PKH juga dapat dilihat dari kemampuan program dalam menjangkau kelompok sasaran yang tepat. Dalam hal ini, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi salah satu indikator penting. Data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia menunjukkan bahwa jumlah KPM di Kota Semarang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 2. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Kota Semarang

Tahun	Jumlah KPM
2020	72.000
2021	74.500
2022	76.200
2023	75.800

Stabilitas jumlah penerima manfaat ini menunjukkan bahwa PKH telah memiliki sistem penyaluran yang cukup konsisten. Namun, di sisi lain, kondisi ini juga menimbulkan pertanyaan terkait dinamika data penerima manfaat. Dalam realitas sosial, kondisi ekonomi masyarakat bersifat dinamis, sehingga seharusnya terdapat pergerakan yang lebih fleksibel dalam jumlah penerima manfaat, baik dalam bentuk penambahan maupun pengurangan. Jika jumlah penerima cenderung stagnan, maka terdapat kemungkinan bahwa proses pemutakhiran data belum berjalan secara optimal. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas program.

Dari sisi pencapaian tujuan program, PKH telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan. Bantuan yang diberikan kepada keluarga miskin mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan, seperti memastikan anak tetap bersekolah dan memanfaatkan layanan kesehatan secara rutin. Kondisi ini menunjukkan bahwa PKH tidak hanya berfungsi sebagai bantuan finansial, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat. Perubahan ini menjadi penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang merupakan salah satu faktor kunci dalam pengentasan kemiskinan jangka panjang.

Dampak terhadap kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari meningkatnya kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar. Bantuan yang diterima melalui PKH membantu mengurangi beban pengeluaran, sehingga masyarakat dapat mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk kebutuhan lain yang lebih produktif. Namun demikian, efektivitas program masih menghadapi tantangan dalam hal keberlanjutan dampak. Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial menjadi isu yang perlu diperhatikan, karena

dapat menghambat terciptanya kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara program bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas ekonominya.

Efisiensi Pengelolaan Anggaran PKH

Efisiensi pengelolaan anggaran PKH berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Dalam konteks ini, efisiensi tidak hanya dilihat dari besarnya anggaran yang dikeluarkan, tetapi juga dari hubungan antara input dan output yang dihasilkan. Semakin optimal hubungan tersebut, maka semakin efisien program yang dijalankan.

Secara nasional, anggaran PKH yang dialokasikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia menunjukkan adanya fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan ini mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan pemerintah terhadap kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

Tabel 3. Anggaran PKH Nasional (2020–2023)

Tahun	Anggaran (Triliun Rp)	Jumlah KPM (Juta)
2020	36,9	10,0
2021	28,7	10,0
2022	28,7	10,0
2023	34,0	10,0

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah penerima manfaat relatif tetap, anggaran yang dialokasikan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan anggaran masih menjadi tantangan, karena peningkatan anggaran tidak selalu diikuti oleh peningkatan output yang signifikan. Dalam konteks ini, diperlukan evaluasi yang lebih mendalam mengenai alokasi dan penggunaan anggaran agar dapat memberikan dampak yang lebih optimal.

Efisiensi juga dapat dianalisis melalui struktur bantuan yang diberikan kepada penerima manfaat. PKH menggunakan pendekatan berbasis kategori, di mana besaran bantuan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing kelompok.

Tabel 4. Besaran Bantuan PKH per Kategori (2023)

Kategori Penerima	Bantuan per Tahun (Rp)
Ibu hamil	3.000.000
Anak usia dini	3.000.000
SD/sederajat	900.000
SMP/sederajat	1.500.000
SMA/sederajat	2.000.000
Lansia	2.400.000
Disabilitas berat	2.400.000

.

Struktur bantuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya mengalokasikan anggaran secara lebih terarah sesuai dengan kebutuhan penerima. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan efisiensi, karena bantuan diberikan secara diferensiatif berdasarkan karakteristik penerima. Namun demikian, efektivitas pendekatan ini tetap bergantung pada akurasi data penerima manfaat. Jika data yang digunakan tidak akurat, maka alokasi bantuan yang telah dirancang secara efisien tetap tidak akan memberikan hasil yang optimal.

Dalam praktiknya, efisiensi PKH juga dipengaruhi oleh ketepatan waktu penyaluran bantuan. Keterlambatan dalam pencairan bantuan masih menjadi permasalahan yang sering terjadi, terutama akibat kendala administratif dan teknis. Meskipun sistem penyaluran telah menggunakan mekanisme non-tunai melalui perbankan, proses verifikasi dan validasi data masih menjadi faktor yang memengaruhi kecepatan distribusi. Keterlambatan ini dapat mengurangi manfaat bantuan, terutama bagi masyarakat yang sangat bergantung pada dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dari sisi transparansi, penggunaan sistem non-tunai telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Sistem ini memungkinkan proses penyaluran bantuan menjadi lebih transparan dan terkontrol, sehingga dapat meminimalkan potensi penyimpangan. Namun demikian, pengawasan tetap diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan program berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Analisis Keterkaitan Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam pengelolaan program publik. Efektivitas yang tinggi menunjukkan bahwa program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan efisiensi menunjukkan bahwa tujuan tersebut dicapai dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Dalam konteks PKH di Kota Semarang, kedua aspek ini belum sepenuhnya berjalan secara seimbang.

Efektivitas program dapat dikatakan cukup baik, terutama dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan serta dalam mengurangi beban ekonomi rumah tangga miskin. Namun, dari sisi efisiensi, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperbaiki, seperti ketidaktepatan sasaran dan keterlambatan penyaluran bantuan. Ketidaktepatan sasaran tidak hanya mengurangi efektivitas program, tetapi juga menyebabkan inefisiensi dalam penggunaan anggaran, karena dana yang seharusnya dialokasikan kepada kelompok yang membutuhkan justru diterima oleh pihak yang tidak berhak.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas data, penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan kapasitas pelaksana program menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kinerja PKH secara keseluruhan. Dengan perbaikan pada aspek-aspek tersebut, diharapkan program PKH dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Semarang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Semarang menunjukkan kinerja yang cukup baik dari sisi efektivitas, namun masih memerlukan peningkatan dari sisi efisiensi. Efektivitas program terlihat dari kontribusinya dalam menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta membantu meringankan beban ekonomi masyarakat miskin. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi efektivitas, terutama terkait dengan ketepatan sasaran penerima manfaat. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya proses pemutakhiran data, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara penerima bantuan dengan kondisi riil di lapangan.

Dari sisi efisiensi, meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai mekanisme seperti penyaluran bantuan secara non-tunai dan sistem bantuan berbasis kategori, masih ditemukan permasalahan seperti keterlambatan penyaluran dan fluktuasi anggaran yang belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan output program. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran PKH masih perlu ditingkatkan agar penggunaan sumber daya menjadi lebih optimal. Secara keseluruhan, efektivitas dan efisiensi PKH di Kota Semarang belum sepenuhnya berjalan secara seimbang. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang berkelanjutan agar program ini dapat memberikan dampak yang lebih maksimal dalam upaya pengentasan kemiskinan.

REFERENSI

Badan Pusat Statistik. (2024). *Persentase penduduk miskin Kota Semarang 2019–2023*. https://jateng.bps.go.id/indicator/23/34/1/persentase-penduduk-miskin.html

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). *Cek data penerima bantuan sosial*. https://cekbansos.kemensos.go.id

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). *Program Keluarga Harapan (PKH)*. https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan

Khasanah, U.. (2023). Analisis dampak Program Keluarga Harapan terhadap kesejahteraan rumah tangga. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*. https://ejournal.undip.ac.id

Mahmudi. (2015). *Manajemen kinerja sektor publik*. UPP STIM YKPN.

Murniawaty, I.. (2021). Efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan publik dalam program bantuan sosial. *Jurnal Administrasi Publik*. https://journal.unnes.ac.id

Musgrave, Richard A.. (1959). *The theory of public finance: A study in public economy*. McGraw-Hill.

Nova, R.., Priyadi, B.., & Purnaweni, H.. (2023). Evaluasi implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi*. https://ejournal.undip.ac.id

Ramadhani, R.., & Novarianti, E.. (2024). Efektivitas program bantuan sosial dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Kebijakan Publik*. https://journal.ui.ac.id.